



Proyeksi Implikasi Geopolitik dan Militer Perjanjian Peningkatan Kerja Sama Pertahanan Filipina-Amerika Serikat bagi ASEAN

Adam Ardamsyah

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 06, 2026

Revised August 04, 2026

Accepted August 08, 2026

Available online August 11, 2026

Kata Kunci :

ASEAN, EDCA, Keamanan Regional, PMESII, Rivalitas Kekuatan Besar

Keywords:

ASEAN, EDCA, Regional Security, PMESII, Great-Power Rivalry



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Perjanjian Peningkatan Kerja Sama Pertahanan Filipina-Amerika Serikat memperluas akses rotasional pasukan Amerika Serikat ke fasilitas pertahanan Filipina dan memperkuat interoperabilitas kedua negara. Perkembangan tersebut berpotensi memengaruhi keamanan Asia Tenggara di tengah rivalitas kekuatan besar dan sengketa Laut China Selatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sistemik perjanjian tersebut terhadap keamanan kawasan ASEAN hingga 2035. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-strategis dengan metodologi estimatif dan kerangka politik, militer, ekonomi, sosial, informasi, serta infrastruktur. Data sekunder periode 2014-2025 diperoleh dari artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan keamanan kawasan, kemudian diklasifikasikan, diberi skor, dibobotkan, dan diproyeksikan ke dalam tiga skenario. Hasil analisis menunjukkan nilai dampak tertimbang 3,75 dari skala lima. Dimensi militer menjadi faktor paling dominan, diikuti dimensi politik dan infrastruktur. Perjanjian tersebut memperkuat daya tangkal Filipina dan kapasitas respons Amerika Serikat, tetapi juga meningkatkan risiko dilema keamanan, fragmentasi sikap ASEAN, kontestasi informasi, dan kerentanan ekonomi. Skenario yang paling mungkin adalah stabilitas relatif dengan kompetisi strategis yang meningkat. Penguatan konsultasi keamanan ASEAN, transparansi pelaksanaan perjanjian, dan langkah pembangunan kepercayaan diperlukan untuk mencegah pergeseran menuju eskalasi terbuka.

ABSTRACT

The Enhanced Defense Cooperation Agreement between the Philippines and the United States expands rotational access to Philippine defense facilities and strengthens bilateral interoperability. This development may affect Southeast Asian security amid great-power rivalry and disputes in the South China Sea. This study analyzes the agreement's systemic implications for ASEAN regional security through 2035. It applies a qualitative-strategic approach that combines estimative methodology with political, military, economic, social, information, and infrastructure analysis. Secondary data covering 2014-2025 were drawn from scholarly publications, policy documents, and regional security reports, then classified, scored, weighted, and projected into three scenarios. The analysis produces a weighted impact score of 3.75 on a five-point scale. The military dimension is the most influential, followed by the political and infrastructure dimensions. The agreement strengthens Philippine deterrence and United States response capacity, but it also increases the risks of a security dilemma, divergent ASEAN positions, information contestation, and economic vulnerability. The most likely trajectory is relative stability accompanied by intensifying strategic competition. Stronger ASEAN security consultation, greater implementation transparency, and confidence-building measures are therefore required to prevent a shift toward open escalation.

1. PENDAHULUAN

Keamanan regional Asia Tenggara semakin dipengaruhi perubahan struktur geopolitik dan persaingan strategis Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok. Posisi kawasan pada jalur perdagangan dan energi dunia, terutama Laut China Selatan, membuat sengketa maritim berdampak langsung pada stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan. ASEAN telah mengembangkan mekanisme multilateral berbasis norma, tetapi perbedaan persepsi ancaman dan kepentingan nasional sering membatasi respons kolektif sehingga sebagian negara anggota

*Corresponding author

E-mail address: adaminfantri94@gmail.com (Adam Mardamsyah)

mencari jaminan tambahan melalui aliansi bilateral atau kemitraan strategis eksternal (Acharya, 2014; Buzan & Wæver, 2003; Emmers, 2014).

Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) yang ditandatangani Filipina dan AS pada April 2014 merupakan salah satu respons terhadap perubahan tersebut. Perjanjian ini memberi akses rotasional kepada pasukan AS untuk menggunakan fasilitas pertahanan Filipina, meningkatkan infrastruktur, dan memperkuat interoperabilitas tanpa menetapkan pangkalan permanen. EDCA melengkapi *Mutual Defense Treaty* 1951 dan *Visiting Forces Agreement* 1999 serta membantu Filipina mengatasi keterbatasan kapabilitas pertahanannya (De Castro, 2017; Heydarian, 2018). Bagi AS, EDCA mendukung postur kehadiran maju di Indo-Pasifik.

Implementasi EDCA berkembang dari lima lokasi awal menjadi sembilan fasilitas setelah penambahan empat lokasi pada 2023. Persebaran fasilitas tersebut meningkatkan akses menuju Laut China Selatan dan Selat Taiwan serta memperluas kapasitas mobilitas udara, pengawasan, logistik, latihan, dan respons bencana (Grossman, 2023; Storey, 2020). Ringkasan lokasi dan signifikansi geostrategisnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Lokasi dan signifikansi geostrategis fasilitas EDCA Filipina-AS

No.	Lokasi	Wilayah	Signifikansi geostrategis
1	Antonio Bautista Air Base	Palawan	Proyeksi kekuatan ke Laut China Selatan
2	Basa Air Base	Pampanga	Pertahanan udara Luzon
3	Fort Magsaysay	Nueva Ecija	Latihan darat dan mobilisasi pasukan
4	Mactan-Benito Ebuen Air Base	Cebu	Simpul logistik dan respons bencana
5	Lumbia Air Base	Mindanao	Dukungan stabilitas kawasan selatan
6	Naval Base Camilo Osias	Cagayan	Akses dekat Selat Taiwan
7	Lal-lo Airport	Cagayan	Mobilitas udara dan pengawasan
8	Camp Melchor Dela Cruz	Isabela	Penempatan maju
9	Balabac Island	Palawan	Titik sempit maritim Laut China Selatan

Sumber: diolah dari Department of Defense Philippines dan U.S. Indo-Pacific Command (2014-2024).

Lima dari sembilan fasilitas berada pada koridor Laut China Selatan-Selat Taiwan. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa EDCA tidak hanya mendukung pertahanan domestik dan bantuan kemanusiaan, tetapi juga memiliki fungsi *forward deterrence*. Konsekuensinya bagi ASEAN bersifat ganda: sebagian negara memandang kehadiran AS sebagai penyeimbang, sedangkan sebagian lain mengkhawatirkan militerisasi kawasan dan keterlibatan ASEAN dalam rivalitas kekuatan besar. Perbedaan respons ini mencerminkan strategi diversifikasi dan *hedging* yang tidak seragam di antara negara anggota (Goh, 2018; Kuik, 2016; Haacke & Morada, 2021).

Kajian terdahulu terutama membahas dasar hukum EDCA, adaptasi aliansi Filipina-AS, dan respons terhadap peningkatan kekuatan Tiongkok (De Castro, 2014; Montolalu & Perwita, 2019). Kajian tentang Laut China Selatan dan strategi ASEAN juga telah menjelaskan pola *hedging* serta keterbatasan sentralitas ASEAN (Tan, 2020; Yeo, 2022). Namun, dampak EDCA terhadap ASEAN sebagai sistem regional masih sering dianalisis secara deskriptif, retrospektif, atau berfokus pada dimensi militer. Kesenjangan ini menuntut analisis yang menghubungkan dimensi politik, militer, ekonomi, sosial, informasi, dan infrastruktur dengan proyeksi jangka menengah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menjawab pertanyaan: bagaimana implementasi EDCA memengaruhi keamanan kawasan ASEAN dan skenario apa yang paling mungkin berkembang hingga 2035? Penelitian bertujuan menilai dampak multidimensional EDCA, mengidentifikasi kecenderungan tiap dimensi, dan menyusun implikasi kebijakan. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi kerangka PMESII dengan metodologi estimatif untuk menghubungkan data 2014-2025, tren kontemporer, dan skenario masa depan.

2. KAJIAN LITERATUR

Aliansi, Daya Tangkal, dan Dilema Keamanan

Teori aliansi menjelaskan bahwa negara membangun kerja sama pertahanan untuk menyeimbangkan ancaman yang dipersepsikan, bukan hanya kekuatan material lawan. Dalam kerangka *balance of threat*, keputusan Filipina memperkuat EDCA dapat dipahami sebagai respons terhadap kedekatan geografis, kapabilitas militer, dan perilaku Tiongkok di wilayah sengketa (Walt, 1987). Pada tingkat regional, ketergantungan yang meningkat pada mitra eksternal dapat mengurangi kapasitas ASEAN untuk menyusun posisi bersama dan mempertahankan peran sentralnya (Narine, 2019).

Daya tangkal bekerja ketika kehadiran dan kemampuan respons meningkatkan biaya agresi. Akses rotasional, latihan gabungan, dan interoperabilitas dapat memperkuat daya tangkal Filipina. Akan tetapi, peningkatan postur satu pihak juga dapat memicu *security dilemma*, yaitu respons tandingan berupa patroli, latihan, dan operasi zona abu-abu yang meningkatkan risiko salah perhitungan (Erickson & Collins, 2021; Fravel, 2020; Zedong & Liff, 2019). Dengan demikian, efek stabilisasi EDCA bergantung pada transparansi, komunikasi krisis, dan pengendalian eskalasi.

Interdependensi dan Dimensi Nonmiliter

Pendekatan *complex interdependence* menekankan bahwa stabilitas keamanan dan ekonomi saling terkait. Jalur perdagangan Laut China Selatan dapat memperoleh manfaat dari peningkatan daya tangkal, tetapi kompetisi militer yang membesar juga dapat meningkatkan premi risiko, volatilitas investasi, dan kerentanan rantai pasok (Keohane & Nye, 2012; Menon, 2021; Ravenhill, 2022). Dampak ekonomi karena itu tidak selalu searah dengan peningkatan kapabilitas militer.

Konstruktivisme menunjukkan bahwa identitas nasional, memori sejarah, dan narasi kedaulatan memengaruhi penerimaan publik terhadap kehadiran militer asing (Huang, 2021; Thompson, 2020). Pada dimensi informasi, EDCA menjadi objek persaingan narasi antara kerja sama defensif, tatanan berbasis aturan, militerisasi, dan ancaman kedaulatan. Media digital dapat mempercepat penyebaran pesan strategis dan disinformasi (Kuo & Tsai, 2022; Lim, 2023). Pada dimensi infrastruktur, fasilitas penggunaan ganda dapat mendukung bantuan kemanusiaan sekaligus menjadi pengganda daya operasi militer (Liff, 2021; Till, 2018).

Metodologi Estimatif dan Kerangka PMESII

Metodologi estimatif digunakan untuk menilai kemungkinan masa depan melalui integrasi fakta, asumsi, indikator, dan tingkat ketidakpastian. Pendekatan ini tidak dimaksudkan menghasilkan kepastian statistik, tetapi membangun penilaian yang dapat ditelusuri dan diperbarui ketika indikator berubah (Heuer & Pherson, 2015). Penggunaan lebih dari satu skenario mengurangi kecenderungan pada satu hasil dan mendorong evaluasi alternatif secara eksplisit (Tetlock & Gardner, 2016). Dalam penelitian ini, PMESII berfungsi sebagai kerangka integratif agar konsekuensi EDCA tidak direduksi menjadi persoalan militer semata.

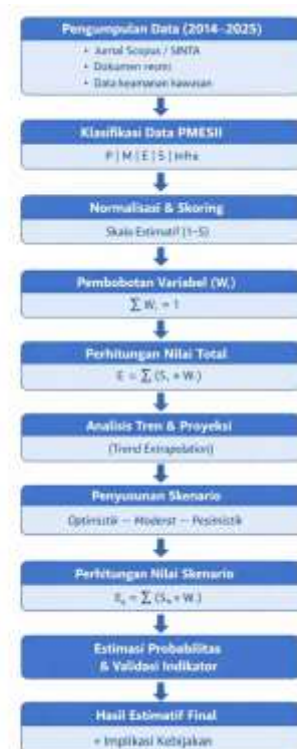
3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-strategis dengan metodologi estimatif. Unit analisisnya adalah implikasi implementasi EDCA terhadap keamanan kawasan ASEAN. Periode pengamatan mencakup 2014-2025, sedangkan horizon proyeksi ditetapkan hingga 2035 untuk menangkap dampak kumulatif kebijakan pertahanan tanpa memperluas spekulasi

terlalu jauh. Penelitian berbasis studi dokumen sehingga tidak melibatkan responden atau lokasi lapangan tertentu.

Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal bereputasi, buku metodologi dan teori, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, serta laporan keamanan Indo-Pasifik. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur, kemudian diseleksi berdasarkan relevansi terhadap EDCA, ASEAN, Laut China Selatan, postur militer, ekonomi regional, opini publik, narasi informasi, dan infrastruktur pertahanan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan penjelasan akademik, pernyataan kebijakan, dan kecenderungan indikator kawasan.

Analisis dilaksanakan melalui delapan tahap: pengumpulan data; klasifikasi ke dalam dimensi PMESII; normalisasi skor pada skala 1-5; penetapan bobot; perhitungan nilai dampak tertimbang; proyeksi tren; penyusunan skenario optimistik, moderat, dan pesimistik; serta validasi dengan indikator yang dapat diamati. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur metodologi estimatif untuk analisis EDCA

Sumber: diolah peneliti, 2025.

Dimensi, indikator utama, dan bobot analisis dirangkum dalam Tabel 2. Bobot militer dan politik lebih besar karena EDCA merupakan perjanjian pertahanan dan berdampak langsung pada postur serta hubungan antarnegara. Bobot lain tetap dipertahankan untuk menangkap efek lintas sektor.

Tabel 2. Dimensi PMESII, indikator, dan bobot analisis

Dimensi	Indikator utama	Landasan analisis	Bobot
Politik	Aliansi bilateral, sentralitas ASEAN, respons diplomatik	Teori aliansi dan balance of threat	0,20
Militer	Penempatan maju, latihan, ISR, daya tangkal	Teori daya tangkal dan pertahanan maju	0,25
Ekonomi	Jalur perdagangan, investasi, kerentanan rantai pasok	Interdependensi kompleks	0,15
Sosial	Opini publik, legitimasi, protes	Konstruktivisme	0,10
Informasi	Narasi strategis, disinformasi, komunikasi	Perang informasi	0,15
Infrastruktur	Fasilitas penggunaan ganda dan logistik	Logistik militer	0,15

Sumber: diolah peneliti berdasarkan kerangka penelitian.

Skor 1 menunjukkan dampak sangat rendah dan skor 5 menunjukkan dampak sangat tinggi. Nilai total dihitung dengan rumus berikut, dengan S_i sebagai skor dimensi ke- i dan W_i sebagai bobotnya.

$$E = \sum (S_i \times W_i), \text{ dengan } \sum W_i = 1$$

Nilai skenario dihitung dengan formula yang sama menggunakan skor tiap skenario. Kedekatan skenario dinilai melalui $D_k = |E - E_k|$; nilai D_k yang lebih kecil menunjukkan kecocokan lebih kuat terhadap penilaian saat ini. Penilaian kecenderungan akhir tidak hanya menggunakan kedekatan angka, tetapi juga konsistensi tren dan indikator lapangan. Karena skoring bersifat analitik dan menggunakan data sekunder, hasilnya merupakan penilaian terstruktur, bukan estimasi probabilitas statistik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian Dampak dan Proyeksi Tren

Skoring empiris menghasilkan nilai total 3,750 dari skala lima, yang menunjukkan dampak menengah-tinggi. Dimensi militer memperoleh skor tertinggi, sedangkan dimensi sosial memperoleh skor terendah. Hasil lengkap disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Skor empiris PMESII implementasi EDCA, 2014-2025

Dimensi	Skor	Bobot	Nilai tertimbang
Politik	4,0	0,20	0,800
Militer	4,5	0,25	1,125
Ekonomi	3,0	0,15	0,450
Sosial	2,5	0,10	0,250
Informasi	3,5	0,15	0,525
Infrastruktur	4,0	0,15	0,600
Total	-	1,00	3,750

Sumber: hasil pengolahan data penelitian.

Nilai tersebut menggambarkan *competitive stability*: peningkatan daya tangkal menahan konflik terbuka, tetapi kompetisi politik, militer, dan informasi terus menguat. Ekstrapolasi tren pada Tabel 4 menunjukkan percepatan terutama pada dimensi militer dan informasi. Ekonomi

cenderung stabil namun rentan terhadap guncangan, sedangkan opini publik bergerak fluktuatif.

Tabel 4. Proyeksi kecenderungan PMESII, 2025-2035

Dimensi	Arah tren	Interpretasi
Politik	Meningkat	Fragmentasi sikap ASEAN berpotensi bertambah
Militer	Meningkat cepat	Latihan, ISR, dan kesiapan respons bertambah
Ekonomi	Stabil/rentan naik	Perdagangan tetap berjalan, tetapi rentan guncangan
Sosial	Relatif tetap	Opini publik fluktuatif dan bergantung pada insiden
Informasi	Meningkat cepat	Kontestasi narasi dan disinformasi menguat
Infrastruktur	Meningkat	Fasilitas penggunaan ganda terus berkembang

Sumber: hasil ekstrapolasi tren penelitian.

Tiga skenario dikembangkan dari kombinasi skor PMESII. Skenario optimistik menggambarkan daya tangkal efektif dan koordinasi regional; skenario moderat menggambarkan stabilitas relatif dengan kompetisi meningkat; sedangkan skenario pesimistik menggambarkan eskalasi, perlombaan postur, dan fragmentasi ASEAN. Hasil perbandingan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa skenario moderat paling dekat dengan kondisi saat ini.

Tabel 5. Perbandingan skor dan kecocokan skenario

Skenario	Nilai estimatif	Selisih dari E = 3,750	Kecenderungan relatif
Optimistik	3,275	0,475	Sedang-rendah
Moderat	3,825	0,075	Tinggi
Pesimistik	4,075	0,325	Sedang

Sumber: hasil perhitungan penelitian.

Kecenderungan moderat juga diperkuat oleh indikator aktual: latihan militer meningkat tetapi masih terkendali; insiden Laut China Selatan tetap fluktuatif; posisi negara ASEAN tidak seragam; retorika AS-Tiongkok kompetitif; dan pembangunan fasilitas penggunaan ganda berlanjut. Indikator tersebut belum menunjukkan eskalasi terbuka, tetapi memperlihatkan risiko pergeseran ke skenario pesimistik apabila mekanisme pengendalian krisis melemah.

Dimensi Politik

Pada dimensi politik, EDCA memperkuat konsolidasi aliansi Filipina-AS. Dukungan lintas pemerintahan Filipina menunjukkan bahwa perjanjian tersebut telah berkembang dari kebijakan sementara menjadi bagian struktural pertahanan nasional (Baviera, 2020; Curato, 2022). Langkah Filipina dapat dipahami sebagai penyeimbangan eksternal terhadap tekanan Tiongkok, tetapi efek regionalnya lebih kompleks karena negara ASEAN memiliki tingkat ancaman, hubungan ekonomi, dan preferensi strategis yang berbeda.

Perbedaan tersebut membatasi kemampuan ASEAN menyusun posisi bersama. Ketika negara anggota semakin mengandalkan aliansi eksternal, sentralitas ASEAN berisiko berubah dari kapasitas substantif menjadi sekadar forum prosedural. Temuan ini sejalan dengan Jones dan Smith (2021) serta Narine (2019), yang menekankan kerentanan persatuan ASEAN di tengah kompetisi kekuatan besar. Meskipun demikian, EDCA tidak otomatis menghilangkan sentralitas ASEAN; dampaknya bergantung pada kemampuan ASEAN mengembangkan konsultasi keamanan yang tidak memaksa negara anggota memilih blok.

Dimensi Militer

Dimensi militer memberikan kontribusi tertinggi terhadap nilai total. Akses ke sembilan fasilitas meningkatkan kemampuan penempatan maju, *intelligence, surveillance, and reconnaissance* (ISR), mobilitas udara, logistik, dan respons cepat. Peningkatan intensitas latihan Balikatan juga menunjukkan pergeseran dari kerja sama simbolik menuju interoperabilitas operasional yang mencakup pertahanan maritim dan respons kontingensi (Santos, 2023).

Dalam perspektif daya tangkal, peningkatan kemampuan tersebut menaikkan biaya strategis bagi aktor yang mempertimbangkan penggunaan kekuatan. Namun, pola yang sama dapat memicu respons tandingan berupa patroli, latihan, atau operasi zona abu-abu. Risiko utamanya bukan hanya konflik yang disengaja, tetapi juga salah perhitungan saat kapal, pesawat, dan aparat penegak hukum beroperasi dalam ruang yang padat (Erickson & Collins, 2021; Fravel, 2020; Zedong & Liff, 2019). Karena itu, efektivitas daya tangkal perlu disertai komunikasi krisis dan aturan perjumpaan yang jelas.

Dimensi Ekonomi

Dampak ekonomi EDCA bersifat ambivalen. Kehadiran dan kesiapan respons AS dapat memperkuat persepsi keamanan jalur pelayaran yang menopang perdagangan, energi, dan logistik regional. Stabilitas maritim penting karena gangguan di Laut China Selatan dapat menyebar ke biaya angkut, asuransi, dan ketersediaan rantai pasok (Menon, 2021).

Sebaliknya, kompetisi militer yang meningkat dapat menambah ketidakpastian investasi dan mendorong diversifikasi risiko. Interdependensi ekonomi tidak otomatis mencegah ketegangan, terutama ketika hubungan ekonomi berjalan bersamaan dengan rivalitas strategis. Oleh sebab itu, manfaat ekonomi dari daya tangkal akan berkurang apabila eskalasi memicu sanksi, pembatasan perdagangan, atau perubahan rute investasi (Ravenhill, 2022).

Dimensi Sosial dan Informasi

Pada dimensi sosial, penerimaan terhadap EDCA dipengaruhi pengalaman sejarah, identitas nasional, dan persepsi kedaulatan. Di Filipina, sebagian publik memandang AS sebagai mitra keamanan, sedangkan kelompok lain mengkritik kehadiran militer asing. Di negara ASEAN lain, perhatian publik cenderung meningkat ketika terjadi insiden maritim atau pemberitaan intensif. Legitimasi sosial karena itu dapat berubah cepat dan memengaruhi ruang gerak kebijakan pertahanan (Huang, 2021; Thompson, 2020).

Pada dimensi informasi, AS dan Filipina membingkai EDCA sebagai kerja sama defensif dan pendukung tatanan berbasis aturan, sedangkan Tiongkok cenderung menggambarkan sebagai militerisasi dan ancaman terhadap stabilitas kawasan. Persaingan narasi di media digital memperbesar risiko disinformasi dan polarisasi (Kuo & Tsai, 2022). Ketidadaan narasi ASEAN yang konsisten membuat kawasan lebih sering menjadi objek persaingan pesan daripada aktor yang membentuk agenda sendiri (Lim, 2023).

Dimensi Infrastruktur

Fasilitas EDCA memiliki karakter penggunaan ganda. Modernisasi landasan, gudang, pelabuhan, dan jaringan pendukung dapat memperbaiki respons bencana serta bantuan kemanusiaan. Pada saat yang sama, fasilitas tersebut memperpanjang jangkauan dan keberlanjutan operasi militer AS sehingga berfungsi sebagai *force multiplier* (Till, 2018).

Dari perspektif logistik militer, nilai strategis infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi juga kemampuan memindahkan personel, bahan bakar, informasi, dan peralatan secara cepat. Karena itu, pembangunan fasilitas dapat mengubah kalkulasi aktor lain

meskipun kehadiran pasukan bersifat rotasional (Liff, 2021). Transparansi mengenai fungsi, jenis kegiatan, dan batas penggunaan fasilitas menjadi penting untuk mengurangi persepsi ofensif.

Sintesis Skenario dan Implikasi Kebijakan

Sintesis PMESII menunjukkan bahwa stabilitas relatif dengan kompetisi meningkat merupakan skenario paling mungkin. Temuan ini memperluas kajian EDCA yang berfokus pada aliansi bilateral dengan menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara postur militer, fragmentasi politik, volatilitas ekonomi, legitimasi sosial, kontestasi informasi, dan infrastruktur penggunaan ganda (De Castro, 2014; Storey, 2020). Hasil tersebut juga mendukung argumen bahwa strategi *hedging* ASEAN dapat mempertahankan fleksibilitas, tetapi tidak selalu menghasilkan kohesi ketika tekanan strategis meningkat (Tan, 2020; Yeo, 2022).

Implikasi kebijakan utamanya adalah kebutuhan mengelola daya tangkal tanpa membentuk persepsi pengepungan. ASEAN perlu memperkuat konsultasi melalui mekanisme yang dipimpinnya, termasuk forum menteri pertahanan dan langkah pembangunan kepercayaan maritim. Filipina dan AS perlu meningkatkan transparansi mengenai kegiatan, fungsi fasilitas, dan batas operasional EDCA. Negara ASEAN nonpihak perlu mempertahankan kapasitas pertahanan nasional dan diplomasi multilateral agar diversifikasi strategis tidak berkembang menjadi fragmentasi permanen.

5. KESIMPULAN

EDCA memberikan dampak multidimensional terhadap keamanan ASEAN. Nilai tertimbang 3,750 menunjukkan dampak menengah-tinggi, dengan dimensi militer sebagai faktor dominan, diikuti politik dan infrastruktur. Perjanjian tersebut memperkuat daya tangkal Filipina, interoperabilitas, dan kapasitas respons AS, tetapi sekaligus meningkatkan risiko dilema keamanan, perbedaan sikap ASEAN, kontestasi informasi, serta kerentanan ekonomi dan sosial.

Proyeksi hingga 2035 menempatkan skenario moderat-stabilitas relatif dengan kompetisi strategis yang meningkat-sebagai kecenderungan paling kuat. Skenario ini dapat bergeser ke arah pesimistik apabila insiden maritim meningkat, komunikasi krisis melemah, atau pembangunan fasilitas dipersepsikan ofensif. Sebaliknya, transparansi, mekanisme konsultasi ASEAN, dan langkah pembangunan kepercayaan dapat mempertahankan efek daya tangkal tanpa mendorong eskalasi terbuka.

Penelitian merekomendasikan penguatan arsitektur keamanan yang dipimpin ASEAN, peningkatan transparansi pelaksanaan EDCA oleh Filipina dan AS, serta pengembangan mekanisme pencegahan insiden di laut dan udara. Penelitian lanjutan perlu melengkapi skoring sekunder dengan elisitasi pakar, data indikator yang lebih terukur, dan pembaruan berkala agar perubahan skenario dapat dinilai secara lebih reliabel.

6. REFERENSI

- Acharya, A. (2014). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order* (2nd ed.). Routledge.
- Baviera, A. (2020). Philippine foreign policy under strategic uncertainty. *Asian Journal of Political Science*, 28(2), 125-143.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and powers: The structure of international security*. Cambridge University Press.
- Curato, N. (2022). Public opinion and foreign policy in the Philippines. *Journal of East Asian Studies*, 22(3), 345-364.

- De Castro, R. C. (2014). The 21st century Philippine-U.S. Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). *Korean Journal of Defense Analysis*, 26(3), 401-420.
- De Castro, R. C. (2017). The Philippines-U.S. alliance in the age of China's rise. *Asian Politics & Policy*, 9(3), 403-422. <https://doi.org/10.1111/aspp.12340>
- Emmers, R. (2014). ASEAN and the securitization of the South China Sea. *The Pacific Review*, 27(4), 547-570. <https://doi.org/10.1080/09512748.2014.924230>
- Erickson, A. S., & Collins, G. B. (2021). China's gray zone operations. *Naval War College Review*, 74(2), 1-27.
- Fravel, M. T. (2020). Power shifts and escalation in maritime disputes. *International Security*, 44(4), 44-88.
- Goh, E. (2018). ASEAN's strategic equidistance: Not neutrality but omni-enmeshment. *International Affairs*, 94(1), 113-131. <https://doi.org/10.1093/ia/iix219>
- Grossman, D. (2023). U.S. force posture and alliance dynamics in the Philippines. *Asia Policy*, 18(2), 5-12.
- Haacke, J., & Morada, N. M. (2021). ASEAN centrality and the Indo-Pacific: Challenges and opportunities. *The Pacific Review*, 34(6), 985-1012. <https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1857312>
- Heuer, R. J., Jr., & Pherson, R. H. (2015). *Structured analytic techniques for intelligence analysis* (2nd ed.). CQ Press.
- Heydarian, R. (2018). Duterte's pivot to China and the future of the Philippines-U.S. alliance. *Asian Journal of Political Science*, 26(3), 367-386.
- Huang, C. (2021). Identity, memory, and security politics in Southeast Asia. *Asian Security*, 17(1), 1-20.
- Jones, D. M., & Smith, M. L. R. (2021). ASEAN unity and great power rivalry. *The Pacific Review*, 34(4), 567-589.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). *Power and interdependence* (4th ed.). Pearson.
- Kuik, C. C. (2016). How do weaker states hedge? Unpacking ASEAN states' alignment behavior. *International Security*, 40(3), 159-185. https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00260
- Kuo, M. A., & Tsai, T. (2022). Information warfare in the Indo-Pacific. *Journal of Strategic Studies*, 45(7), 1023-1045.
- Liff, A. P. (2021). The logistics of power projection in Asia. *Security Studies*, 30(3), 455-487.
- Lim, J. H. (2023). Strategic narratives and ASEAN. *Contemporary Southeast Asia*, 45(1), 85-109.
- Menon, J. (2021). Trade routes and regional stability in Southeast Asia. *Asian Economic Policy Review*, 16(2), 215-231.
- Montolalu, R. R. K., & Perwita, B. (2019). Philippine-U.S. defense cooperation to respond to China's assertiveness. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 3(2), 101-118.
- Narine, S. (2019). ASEAN in an era of strategic competition. *Asian Survey*, 59(2), 198-219.
- Ravenhill, J. (2022). Global political economy and regional insecurity. *Review of International Political Economy*, 29(4), 1234-1256.
- Santos, A. F. (2023). Military exercises and alliance interoperability. *Defense & Security Analysis*, 39(2), 150-167.
- Storey, I. (2020). The South China Sea dispute: Rising tensions, unresolved disputes. *Asian Affairs*, 51(1), 1-15. <https://doi.org/10.1080/03068374.2020.1712673>
- Tan, S. S. (2020). Consigned to hedge: South China Sea disputes and ASEAN's strategic responses. *Asian Security*, 16(2), 83-101. <https://doi.org/10.1080/14799855.2019.1649275>
- Tetlock, P. E., & Gardner, D. (2016). *Superforecasting: The art and science of prediction*. Crown Publishers.
- Thompson, M. R. (2020). Nationalism and security discourse in Southeast Asia. *Asian Affairs*, 51(3), 456-474.

- Till, G. (2018). Seapower and maritime infrastructure. *Journal of Strategic Studies*, 41(1-2), 28-54.
- Walt, S. M. (1987). *The origins of alliances*. Cornell University Press.
- Yeo, A. (2022). Security alignment in Southeast Asia: Omnidirectional hedging and great power rivalry. *Journal of Strategic Studies*, 45(6), 873-898. <https://doi.org/10.1080/01402390.2021.1898906>
- Zedong, Y., & Liff, A. P. (2019). China's maritime gray zone operations. *International Security*, 44(1), 7-48. https://doi.org/10.1162/isec_a_00351